

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*.

Istilah tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian IPR merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik karena rejim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan

mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional.

Adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*). Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat asli/tradisional semakin meningkat karena masyarakat asli/tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual yang sangat "bersahabat" dengan alam. Karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini maka yang kebanyakan terjadi justru adalah eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

Joseph E. Stiglitz dalam *Making Globalization Work*, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya.<sup>1</sup> Jika rambu hak penguasaan lainnya adalah tidak memonopoli, mengurangi efisiensi ekonomi, dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monopoli. Kekuatan

---

<sup>1</sup> Joseph E. Stiglitz dalam Andri TK, *Nasib HaKI Tradisional Kita*, (<http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisionalKita.html>)

monopoli menciptakan persewaan monopoli (laba yang berlebih), dan laba inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian. Ketidakefisienan yang berkaitan dengan kekuatan monopoli dalam memanfaatkan pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuan dalam ekonomi disebut komoditas umum.

Menurut Rahardi Ramelan dalam Andri TK mengatakan bahwa pemberian hak monopoli ini, sering kali merugikan kepentingan umum dan tidak selalu sama dengan wilayah lain. Di Indonesia misalnya, pengetahuan tradisional yang berkembang berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus pula.

Praktek monopoli terlebih dalam hal hak intelektual menjadi suatu yang asing dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kepemilikan bersama. Pemilikan bersama dapat hadir dalam pasar secara terbatas. Orang-orang dengan hubungan kekerabatan dekat, seperti keluarga batih, mungkin untuk secara bersama mengatasnamakan hak kepemilikan atas suatu benda. Dimana hak kepemilikan ini tidak selalu disahkan menurut hukum, melainkan atas dasar konvensi. Masing-masing anggota boleh memanfaatkan guna-benda untuk keperluan pribadi atau bersama, dengan sepengetahuan yang lain. Hal ini dimungkinkan selain akibat anggotanya percaya dan menghormati kebersamaan yang termaknakan pada benda, juga karena di sini kedekatan hubungan pada umumnya merupakan jaminan.

Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau walaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat.

Prinsip hukum adat yang universal dan mungkin yang paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibandingkan individu. Dikatakan bahwa pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam suatu masyarakat. Kepopuleran konsep harta komunal mengakibatkan HAKI bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat desa di Indonesia. Sangat mungkin bahwa HAKI yang individualistis akan disalahtafsirkan atau diabaikan karena tidak dianggap relevan. Usaha-usaha untuk memperkenalkan hak individu bergaya barat yang disetujui dan diterapkan secara resmi oleh negara, tetapi sekaligus bertentangan dengan hukum adat seringkali gagal mempengaruhi perilaku masyarakat tradisional. Sangat mungkin bahwa masyarakat di tempat terpencil tidak akan mencari perlindungan untuk kekayaan intelektual dan akan mengabaikan hak kekayaan intelektual orang lain dengan alasan yang sama.

Di tengah upaya Indonesia berusaha melindungi kekayaan tradisionalnya, negara-negara maju justru menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai *public property* atau *public domain*, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara

internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Seperti halnya yang disarankan oleh Peter Jaszi dari *American University* bahwa perlindungan sebaiknya disesuaikan dengan roh dan semangat dari budaya tradisional tersebut.

Peraturan yang dibuat tidak digeneralisasi yang akhirnya membuat kesenian tradisional sebagai subyek dari bentuk baru perlindungan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual tradisional Indonesia dalam dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan menggantinya dengan individualisme dan liberalisme. Selama beberapa abad kepulauan Indonesia telah menghasilkan karya-karya artistik yang luar biasa. Karya-karya ini merupakan aspek dari hubungan lokal dan hubungan yang lebih luas dalam bidang perdagangan, agama, kekerabatan dan juga politik. “Kesenian tradisional” ini memiliki nilai bagi orang Indonesia. Kesenian tradisional bukan hanya merupakan suatu hiburan, wahana inspirasi dan pencerahan bagi orang Indonesia, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menempatkan dirinya secara positif dan kreatif dalam hubungannya terhadap sesama dan dalam hubungannya terhadap agama. Pengetahuan dan praktek kesenian berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, identitas kelompok, kebanggaan terhadap daerah dan bangsanya, serta pengembangan kesadaran etika yang mendalam dan bersifat khas.

Gairah kehidupan kesenian ini sebagai sumber dan juga hasil dari proses hubungan yang bersifat kompleks. Gairah berkeaktifitas ini muncul dari sebuah keragaman asli. Kesenian “tradisional” Indonesia seperti wayang kulit,

musik gamelan dan batik Jawa, serta tarian, dan tenun ikat Bali, yang dalam sepanjang sejarah telah dipraktekkan sebagaimana layaknya kesenian Indonesia lainnya dengan tanpa adanya peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Tetapi sekarang timbul kekhawatiran dari kalangan seniman dalam kaitannya dengan keberadaan seni mereka di masa sekarang.

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan di bidang kesenian. Kerena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat tanpa ijin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kesenian tradisional.

Indonesia sebagai negara yang memiliki begitu banyak kebudayaan telah melahirkan berbagai hasil kerajinan yang tersebar di beberapa propinsi seperti tenun, songket dan hasil kerajinan lainnya yang masih belum tersentuh hak atas kekayaan intelektual. Padahal telah kita ketahui bersama bahwa kekayaan intelektual seperti songket, kain tenun dan bentuk kerajinan lainnya telah menjadi

bagian kerajinan masyarakat Indonesia belum memiliki hak cipta yang menjadi hak intelektual dari kreasi budaya tersebut.

Karya kerajinan keris dari masyarakat Indonesia banyak yang belum mendapatkan penghormatan yang layak, sehingga hanya golongan pengusaha tertentu yang mendaftarkan produknya dan mendaftarkan hak ciptanya. Sementara itu, masih banyak bentuk kerajinan keris yang belum terakomodir, khususnya keris yang telah menjadi *public domein* karena sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak dulu. *Public domein* inilah yang kerap didaftarkan orang lain dan hak ciptanya diakui oleh orang yang tidak berhak. Hal ini jelas sangat merugikan hasil kekayaan intelektual masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya karakter bangsa Indonesia yang masih merasa bangga bila kreasi karyanya/hasil budaya bangsa ditiru oleh negara lain.

Pengertian *public domein* (hak cipta rakyat) dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah hak milik bersama yang dipunyai masyarakat terhadap hasil penemuannya.<sup>2</sup> Undang-undang tentang Hak Cipta tersebut harus kita jaga bersama, artinya bahwa penghormatan di bidang hak atas kekayaan intelektual itu harus dimiliki oleh segenap elemen hukum yang menyangkut bidang hak atas kekayaan intelektual, baik mulai dari penemu, kreator/desainer, penegak hukum, masyarakat dan komponen bangsa lainnya.

Kondisi ini tidak terlepas dari kesadaran semua pihak, khususnya penegak hukum dan perangkat yang ada untuk terus mensosialisasikan terhadap pentingnya penghormatan di bidang hak atas kekayaan intelektual ini agar

---

<sup>2</sup> Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung, 2001, Hal. 147.

investor asing tetap memiliki kepercayaan terhadap Indonesia yang pada gilirannya memberi nilai positif terhadap perekonomian nasional.

Persoalan klaim di bidang hak atas kekayaan intelektual dalam hubungan perdagangan internasional akan selalu ada. Karena kemiripan kreasi, motif, desainer kemungkinan sama akan selalu ada. Meskipun perbedaan secara prinsipil akan ada yang meliputi bentuk mode yang dipengaruhi oleh trend dan budaya negara masing-masing.

Di wilayah Karanganyar khususnya di Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo ada beberapa masyarakat yang menggeluti industri kerajinan keris khususnya keris hiasan. Hal ini merupakan aset daerah yang dapat dijadikan potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional, sehingga harus segera ditangani untuk dilindungi dan dikelola untuk mendapat manfaatnya mendukung pendapatan daerah dan nasional. Oleh karena itu semua pihak yang terkait perlu segera untuk melakukan konsolidasi, dan kerjasama untuk melakukan inventarisasi dan mengupayakan perlindungan hukumnya, terutama bagi daerah dalam rangka otonomi dan mengantisipasi pasar bebas yang semakin besar peran dan tanggung jawabnya.

Sejalan dengan perubahan yang ada dalam masyarakat adat, berdasarkan pola pikir, intelektual dan teknologi yang mendukungnya yang dituangkan dalam produk-produk yang bernilai ekonomi maka dari aspek hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum pada bidang ciptaan keris.

Kerajinan Keris di Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo merupakan kerajinan keris yang utamanya untuk keris asesoris, baik keris untuk rias



pengantin, kesenian (tari, ketoprak dan lain-lain) juga untuk hiasan rumah. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan keris yang belum terdaftar perlu adanya perhatian dari penda setempat dengan melakukan berbagai upaya agar kelestarian kerajinan keris dengan ciri khas tertentu tetap dapat dilestarikan dan mendapat perlindungan hukum secara menyeluruh. Di dalam hak cipta ada dua (2) hak yang melekat yaitu: hak ekonomi yang merupakan hak mengambil manfaat ekonominya serta mengkomersilkannya, dan hak moral yang merupakan hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta serta hak untuk tetap dijaga keutuhan ciptaan. Ciptaan kerajinan keris jenis tertentu yang sudah didaftarkan akan mendapat sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan.

Upaya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dan hak cipta terhadap ciptaan kerajinan keris yang belum didaftarkan, penyediaan tempat pendaftaran yang lebih terjangkau dan kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta dan merek serta dilengkapinya fasilitas demi kepentingan pendaftaran, dan adanya tindakan hukum yang tegas penegak hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan merek.

Berdasarkan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tema sekaligus judul yaitu “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENGRAJIN KERIS (Studi Pada Pengrajin Keris Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran ke mana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual dalam pengetahuan tradisional di Indonesia khususnya bagi pengrajin keris.

## **C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan dan supaya asaran penelitian menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang ikehendaki. Selain itu, diharapkan dapat memberikan arah pembatasan yang elas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Bertolak ari diskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan ermasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual dalam pengetahuan tradisional di Indonesia khususnya bagi pengrajin keris?
2. Bagaimanakah prospek hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional dari pembajakan oleh negara lain ?

## **D. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Obyektif**

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual dalam pengetahuan tradisional di Indonesia khususnya bagi pengrajin keris.

- b. Untuk mengetahui prospek hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional dari pembajakan oleh negara lain.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam bidang penulisan karya ilmiah.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan.
- c. Guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

- 1. Dari segi praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui perlindungan hukum terhadap kerajinan keris.
- 2. Dari segi teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

## **F. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis telah mengadakan penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Secara sistematis penelitian ini termasuk penelitian empiris, maksudnya penelitian yang mengutamakan studi ke

lapangan yaitu pada pengrajin keris di Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan data yang diperlukan dengan menggunakan metode tertentu agar diperoleh hasil akhir yang diharapkan, yaitu dengan menggunakan:

#### 1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis pergunakan dalam penelitian adalah pengrajin keris di Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

#### 2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan lepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode dapat dirumuskan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan prosedur<sup>3</sup>. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan non-doktrinal yang yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya.

---

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, Halaman 1.

### 3. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, pengertian penelitian deskriptif yakni penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktivitas manusia, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat dari benda hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber, untuk mengetahui kejelasan hukum terhadap ciptaan kerajinan keris yang belum terdaftar. Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan suatu wawancara yang sudah disusun terlebih dahulu.

#### b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden, Rancangan Undang-undang, Peraturan Menteri, Konvensi-konvensi Internasional, Resolusi Umum PBB, dan instrumen peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1988, Halaman 10.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial yang lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data skunder yang keduanya akan dianalisis.

##### a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual dalam pengetahuan tradisional di Indonesia khususnya bagi pengrajin keris.

##### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, yakni dengan komunikasi secara langsung dengan responden. Wawancara ini dilakukan berdasarkan kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan kepada responden untuk memperoleh data. Hasil wawancara baik lisan maupun

tertulis kemudian dicatat secara sistematis. Adapun wawancara dilakukan dengan pengrajin keris.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>5</sup>

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif.

Penelitian ini melakukan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasikan berbagai peraturan di bidang HAKI khususnya mengenai hak cipta. Di sini ditentukan pengkategorisasian ke dalam sistematisasi ketentuan peraturan perundang-undangan hak cipta.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 103.

dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>6</sup> Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum tentang Indikator Perlindungan Hukum

---

<sup>6</sup> Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik dalam bukunya, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), hal. 17.

<sup>7</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press, 1998), hal. 37.



B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual
2. Filosofi Hak Kekayaan Intelektual

C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hukum Hak Cipta
2. Hak yang Melekat
3. Pengaturan Hak Cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
4. Ketetapan Pidana di Bidang Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

D. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge* = TK)

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional
2. Lingkup Perlindungan Pengetahuan Tradisional
3. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional
4. Manfaat Perlindungan Pengetahuan Tradisional

E. Tinjauan Umum tentang *Folklore*

1. Perlindungan *Folklore* secara Internasional
2. Pengertian *Folklore*
3. Pengaturan *Folklore* di Indonesia

F. Tinjauan Umum Tentang Kesenian Daerah di Indonesia

G. Tinjauan Umum Tentang Keris

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektuan Dalam Pengetahuan Tradisional di Indonesia Khususnya Bagi Pengrajin Keris
  - 1. Deskripsi Kerajinan Keris di Desa Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar
  - 2. Bahan dan Alat yang Digunakan Dalam Proses Pembuatan Keris
  - 3. Proses Pembuatan Keris
  - 4. Perlindungan Hukum Bagi Pengrajin Keris
- B. Proses Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Pengetahuan Tradisional Dari Pembajakan Oleh Negara Lain
- C. Pembahasan Hasil Penelitian
  - 1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengetahuan Tradisional di Indonesia Khususnya Bagi Pengrajin Keris
  - 2. Prospek Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Kesenian Tradisional Dari Pembajakan Oleh Negara Lain

### BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran